



Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat Desa X, Sumbawa Barat

Dinda Febriani¹, Prayitno Basuki², M. Firmansyah³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: dindafebriani286@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01	The problem in this study is the village government's efforts and village efforts to improve the community's economy in managing village funds in X village, West Sumbawa. Based on the results of the research, it shows that Village Fund Management in Village X is guided by the provisions set by the central government, namely Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 wherein the budgeting process goes through planning, implementation and reporting procedures. At the planning stage, Village Fund Management X has been carried out in village meetings or musdes. However, in the implementation and reporting stages it has not been carried out optimally due to delays in development that are not in accordance with the time set and delays in the process of reporting village fund expenditures. The use of Village Funds in improving the community's economy has been well realized, there are several obstacles in development, namely it is difficult to get permission from several land owners or land because it belongs to the community. This development is also one that can have a good impact on improving the community's economy.
Keywords: <i>Management;</i> <i>Village Funds;</i> <i>Community Economic Improvement.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01	Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah desa dan upaya desa meningkatkan perekonomian masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa X, Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa X berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Pada tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa X sudah dilakukan dengan musyawarah desa atau musdes. Namun dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan belum terlaksana dengan maksimal sebab adanya keterlambatan pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu yang di tetapkan dan keterlambatan pada proses pelaporan pengeluaran dana desa.. Penggunaan Dana Desa dalam peningkatkan ekonomi masyarakat sudah terealisasi dengan baik, ada beberapa kendala dalam pembangunan yaitu sulitnya mendapatkan izin dari beberapa pemilik tanah atau lahan sebab milik masyarakat. Pembangunan ini pula menjadi salah satu yang dapat membawa dampak baik untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
Kata kunci: <i>Pengelolaan;</i> <i>Dana Desa;</i> <i>Peningkatan Perekonomian Masyarakat.</i>	

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan pemerintah dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Dari aturan dana tersebut Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah

desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa, serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang mengangkat terkait pengelolaan dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, antaranya Ridha (2019), Manoppo, Kindangen, dan Rotinsulu (2021), menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat juga dilakukan dengan pemberdayaan antara lain dibidang

infrastruktur, dan bidang umum. Tetapi beda dengan penelitian Irwan (2020), penelitian yang dilakukan masih belum maksimal. Karena dilihat dari penelitian bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya ikut serta dalam menentukan program pembangunan Desa, program kerja yang disusun belum terealisasi baik secara fisik infrastruktur seperti sarana dan prasarana.

Desa X ialah desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan merupakan desa kecil. Tapi desa ini juga pasti memiliki beberapa masalah seperti masalah pengangguran, kemiskinan, bantuan desa yang masih kurang merata, pengelolaan desa dan potensi desa yang masih kurang memadai. Dalam sebuah desa peran pemerintah desa sangat penting dalam upaya pembangunan, peningkatan ekonomi masyarakat serta pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Aparat desa juga perlu memerhatikan secara berkala terhadap setiap industri yang ada di desa sebagai salah satu pengembangan sumber daya ekonomi untuk masyarakat desa. Menurut RKP (2020) salah satu pendapat masyarakat desa yang peneliti lakukan ialah pertanian, berkebun, berternak dan pekerja swasta. (PPID Sumbawa Barat, 2020)

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada Kecamatan X ialah pada kecamatan ini ada perusahaan tambang yang mana desa memiliki kelebihan karena adanya PT. newmont Nusa Tenggara. Keberadaan BUMDes juga sebagai alternatif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa dalam meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Program BUMDes ini menunjukkan kontribusi penting dalam peningkatan akses terhadap pelayanan jasa keuangan pada tingkat pedesaan terutama Desa X. Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur juga bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat menjadi hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang bersifat alam semesta / holistic dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif dalam arti

penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan data, logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan perilaku manusia dan menganalisis kualitas- kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif (Fahrul Ridha, 2019).

Thomas Lindlof dengan bukunya "Qualitative communication research methods" Maka penelitian kualitatif selalu mengandaikan adanya suatu kegiatan proses berpikir induktif untuk memahami suatu realitas, peneliti yang terlibat langsung dalam situasi dan latar belakang fenomena yang diteliti serta memusatkan perhatian pada suatu peristiwa kehidupan sesuai dengan konteks penelitian. Dalam desain deskriptif, seorang peneliti hanya tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitian mereka. Ini adalah metode desain berbasis teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan wawasan tentang mengapa dan bagaimana penelitian. Desain deskriptif membantu orang lain lebih memahami kebutuhan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa X

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jayadi selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

"Segala upaya pengelolaan atau penggunaan dana desa di Desa X dilakukan bersifat transparansi. Semua program desa berdasarkan usulan-usulan masyarakat mulai dari musyawarah tingkat dusun hingga desa atau disebut Musdes. Berkaitan dengan penganggaran semua sudah ada aturannya dan ketentuannya, teknisnya sudah ada dan alokasi anggarannya pun sudah mengikuti aturan permendagri tentang alokasi dana khusus yang jadi pedoman dalam pengelolaan dana desa" (Jayadi, 24 Maret 2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alur penggunaan dana desa di Desa X berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang bersifat transparansi, mulai dari penganggaran dana sampai pertanggungjawaban dana. Peraturan ini dilakukan agar desa melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat dan bertanggungjawab. Sesuai

dengan peraturan menteri dalam negeri ada tiga tahap pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Tabel 1. Pengadaan Program Pembangunan Dana Desa Di Desa X Tahun 2019-2022

2019	
Pembangunan	Anggaran
Pagar Posyandu	Rp 34.384.374
Talut Posyandu	Rp 68.370.426
Jalan Usaha Tani	Rp 103.652.830
Jembatan Penghubung Lahan Pertanian	Rp 127.314.127
Pengelolaan Sampah Organik	Rp 157.226.895
Rehab Saluran Drainase	Rp 22.481.636
2020	
Pembangunan	Anggaran
Saluran Drainase Posyandu	Rp 45.760.932
Rehab Poskesdes	Rp 20.754.932
Rabat Beton Jalan Lingkungan	Rp 24.143.568
Pembangunan Deker	Rp 34.231.342
Pintu Air	Rp 79.833.422
Pengecetan Posyandu Desa	Rp 7.124.039
Saluran Irigasi Lang Ai Nusak	Rp 339.395.002
2021	
Pembangunan	Anggaran
Pembangunan Irigasi Lang Bo	Rp 139.111.267
Berugak Lapak Pemuda-Pemudi	Rp 44.953.305
Rabat Beton Jalan Wisata Air Terjun	Rp 17.087.688
Perbaikan Jalan Usaha Tani Ai Nusak	Rp 34.231.342
Pembuatan Sumur Bor Bina Sejahtera III	Rp 20.859.000
2022	
Pembangunan	Anggaran
Rehabilitasi Sidemen dan Normalisasi Embung	Rp 62.560.697
Rehabilitasi Saluran Drainase	Rp 60.439.029
Pembangunan Bronjong	Rp 24.328.963

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 ada lima (5) pembangunan di Desa X yang berjalan yaitu Pagar Posyandu, Talut Posyandu, Jembatan Penghubung Lahan Pertanian, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dan Tempat Pengelolaan Sampah Organik. Tahun 2020 ada empat pembangunan yaitu Pembuatan Saluran Drainase Posyandu, Pembuatan Deker, Pembangunan Pintu Air dan Pembuatan saluran air. Sedangkan tahun 2021 ada tigha pembangunan yaitu Pembangunan Irigasi Lang Ba, Pembangunan Berugak, dan Pembuatan Sumur Bor. Kemudian tahun 2022 hanya Pembangunan Bronjong di Dusun Semelam dengan dana Rp 24.328.963 juta.

Pelaporan hasil pembangunan di Desa X dilakukan dengan membuat laporan yang dikerjakan oleh pemerintah Desa X sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga. Pelaporan ini dilakukan dengan cara Kepala Desa X menyampaikan laporan kerja kepada Bupati melalui camat X yang ada di X Bawah lalu Laporan direalisasikan dengan dana desa atas pelaksanaan pembangunan yang dimuat dalam APBDes disampaikan oleh pemerintah Desa X pada akhir tahun yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembangunan. Senagai bentuk pelaporan penggunaan dana desa terdapat baliho pengeluaran desa.

2. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Peningkatan ekonomi masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup (Aprilia, 2021). Peningkatan perekonomian adalah suatu keadaan adanya upaya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada. Pembangunan ini dibentuk untuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Potensi perekonomian untuk meningkatkan perekonomian desa yaitu dengan lembaga yang tersedia seperti peran BUMDes yang dimanfaatkan desa sebagai penunjang peningkatakan ekonomi. Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengankebutuhan dan potensi Desa. Dalam peningkatan perekonomian masyarakat tentunya harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa itu sendiri. Dan harus mampu menunjang segala aspek kehidupan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut agar semakin maju.

Seperti hasil wawancara saya dengan Ibuk Etrye menjabat sebagai sekretaris desa mengatakan:

"Program pembangunan di desa tentunya harus sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk pembangunan yang sudah terealisasi 2 tahun terakhir yaitu pembangunan jalan usaha tani, bendungan, pembuatan sumur bor, gapura jalan, pemasangan paving blok, pembangunan lapak jualan dan tongkrongan anak muda, dan perbaikan jalan air terjun perpas bidang pariwisata. Gabungan kelompok tani adalah suatu kelompok masyarakat yang dilakukan dengan kegiatan sosialisasi pertanian. Pembangunan jalan usaha tani juga bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengangkut atau membawa hasil gabah. Dapat dilihat semenjak adanya pembangunan ini tentu berdampak positif pada hasil panen. Namun ada juga dampak lain, hasil perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh faktor luar seperti adanya hama dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Tujuan dan harapan dengan adanya pembangunan fisik di Desa X tentunya memudahkan masyarakat tentu berdampak pada hasil perekonomian masyarakat karena sudah ada kemudahan. Selain itu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa X jugadibantu dengan BUMDes seperti adanya lapak jualan untuk pemuda desa yang mana lapak ini juga untuk bersilaturahmi antar muda mudi yang selalu di pantau oleh masyarakat desa. Tahun ini sesuai rencana kerja desa akan membuat Kios Bumdes yang mana akan di gunakan untuk jualan seperti alat tulis, fotokopian, dan lainnya " (Etrye, 27 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa, pernyataan serupa juga di sampaikan oleh Ibu Ashari Novi mengatakan bahwa: "Semua program yang kita kerjakan untuk desa selalu dipikirkan secara matang, berguna, dan sesuai kesepakatan bersama. Salah satunya jalan usaha tani, sumur bor, dan perbaikan jalan semua ini dikerjakan dengan musyawarah dengan masyarakat. Desa ini juga memiliki kebun Desa yang digunakan untuk menanam selain itu tahun 2022 desa memiliki program memberikan modal usaha untuk pedagang kecil dan juga memberikan ternak berupa ayam dan sapi setiap kepala keluarga yang berhak. Program ini berjalan dengan baik masyarakat juga memiliki modal tambahan untuk usaha dan juga ternak yang diberikan desa berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat" (Novi, 27 Maret 2023).

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa sangat berguna bagi masyarakat, seperti memudahkan masyarakat membawa hasil panen, permudah bawa hasil panen ke penggilingan, permudah antar makanan untuk orang disawah, menghemat waktu dijalan, dan bantuan ternak dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Desa X merupakan salah satu desa yang berada dekat dengan tambang yaitu PT. X. Pertambangan sekitar desa ini merupakan perusahaan tambang yang mengeporasikan tembaga dan emas yang terletak di pulau sumbawa tepatnya Desa X. Keunggulan desa berada dekat dengan tambang sangat membantu desa dalam perbaikan desa.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa X yaitu Ibu Hadiyatullah mengatakan:

"Saya sebagai masyarakat yang tinggal di Desa X pernah mendapatkan bantuan setidaknya merasakan pemberian bantuan. Biasa ada kegiatan sosialisasi kebencanaan, usaha rumah tangga, sosialisasi tentang obat pencegah hama semua ini sangat membantu buat saya dan masyarakat lain. Beberapa Mushallah desa juga di buat oleh PT. Newmont pemberian tanah, keramik, semen, genteng guna mencukupi tempat ibadah, dan perbaikan jalan di beberapa tempat di perbaiki oleh PT.X. Saya juga pernah mendapatkan dana bantuan berupa uang." (Hadiyatullah, 23 Maret 2023)

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa Desa X memiliki keunggulan lebih karena berada di sekitar tambang. Meskipun tidak banyak bantuan yang diberi setidaknya bantuan tersebut dapat membantu desa menjadi lebih baik dan dirasakan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bawah dengan pengelolaan dana desa di Desa X dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nya sudah berdampak baik. Dapat dilihat dari perkembangan desa, kebahagiaan masyarakat, serta berbagai kemudahan yang diperoleh masyarakat daripembangunan yang dilakukan pemerintah menggunakan dana desa, dan bantuan dari luar lainnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat desa X, Sumbawa Barat dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa X Kec. X, Sumbawa Barat dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, meskipun pengalokasiannya belum sepenuhnya terealisasikan. Dilihat dari pembangunan infrastruktur desa dan kebahagiaannya masyarakat. Desa X melakukan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada peraturan pemerintah menteri dalam negeri dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang menjadi petunjuk teknis desa melakukan pengelolaan dana desa. Perencanaan di desa sudah dilakukan dengan musyawarah desa/Musdes, Namun dalam pelaksanaan masih mengalami keterlambatan karena keterlambatan kerja dan keterlambatan pencairan dana. Sama pula dari segi pelaporan yang menghambat pencairan dana.
2. Pemerintah desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah desa melakukan pemberdayaan antaranya dibidang infrastruktur seperti adanya lapak desa pemuda pemudi, Kios BUMDes, pembuatan jalan usaha tani, pemberian bibit dan ternak berupa sapi dan ayam, dan BUMDes bidang pariwisata air terjun perpas. Untuk pemberdayaan di bidang umum ialah dengan adanya gabungan kelompok tani/GAPOKTAN, yang mana forum ini sebagai salah satu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa seperti tempat pembelian bibit dan obat-obatan serta sosialisasi tentang pertanian.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan dan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa X diharapkan dapat mengajarkan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dan juga memberikan penjelasan serta pelaporan anggaran dana.
2. Adanya pembinaan serta pengawasan secara berkala entah pembinaan menjait dan pembinaan tentang pertanian yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa X.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Halim, Akuntabilitas Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: 2007.

Anjani, A. K. 2019. *Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa*. Jurist - Diction, 2 (3), 759.

Artikel KPPN (2021). *Pengertian Sumber Dana, Penyaluran Dana dan Prioritas*. Kemenkue

A. Milasari 2022. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Palakka*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar

Baratha, I nyoman (1982). *Desa masyarakat desa dan pembangunan desa*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia

Beni Ahmad Soebani (2012). *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Bernardus Seran Kehika, dan Medan Y onathan Mael 2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot*. NTT: Universitas Timor Kefamenanu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa

BPKAD, Dana Desa dan ADD, 2022

Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2015.

Fahrul Ridha 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa*. Skripsi Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar. Lembaga Perpustakaan Penerbitan.

Fikri dan Agus Reza 2021. *Analisis Pengelolaan Dana desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Study Pada Gampong Lhung Bari Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)*. Aceh

Khumaira Aprilia 2021. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kecamatan Tanah Datar*. IAIN Batusangkar, Ekonomi Syariah.

M. Yusuf. K (2019) *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Pada Perspektif Syariah Di Sulawesi*

- Selatan. Makassar: Universitas Muhammadiyah. Ekonomi Syariah.
- Nisa Aqila 2021. *Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Passeno Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Ekonomi Syariah)*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare
- Nurul Hidayati 2016. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*. Latar Belakang. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah.
- Nunuk Riyani 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun 2016)*. Singopuran: Universitas Muhammadiyah Sukoharjo.
- Nurcholis, H. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Partini H 2018. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Uatara Kabupaten Takalar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Permenkeu 190/PMK.07/2021 *Tentang Pengelolaan Dana Desa*
- Rinto Alexandro, Fendy Hariatama dan Seno Saputra 2021. *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*. Kalimantan Tengah: Universitas Palang Karaya.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Sutopo. H. B. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sumria Panirikan 2021. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara*. Manado: IAIN Perbankan syariah.
- Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010. Wikipedia (2021). Pengelolaan Dana Desa
- Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, Jakarta: CV. Rajawali, 1988 Sujarweni., V. 2018. Akuntansi Desa, "Jurnal Pemberdayaan Masyarakat". 35-36. Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.